

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

ANGGARAN DKI

Ketua DPRD DKI: Evaluasi TGUPP

JAKARTA, KOMPAS — Di tingkat rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta yang digelar sebelumnya, anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan sudah disetujui meski ada anggota yang menolak. Namun, dalam rapat Badan Anggaran DKI Jakarta, Senin (9/12/2019) sore, isu ini kembali dibahas. Tim yang anggarannya ada dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI itu berhubungan langsung dengan Gubernur DKI. Anggarannya kini diusulkan tidak menggunakan APBD, tetapi memakai dana operasional gubernur.

"Tugas pokok dan fungsi TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) ini sangat sentral operasional, bahkan sampai punya kewenangan lebih besar dari satuan kerja perangkat daerah. Sebaiknya evaluasi menyeluruh pada tim ini kalau masih menggunakan APBD, atau di-nol-kan di APBD, pakai saja operasional gubernur," kata anggota Komisi A, Gembong Warsono.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa salah seorang anggota TGUPP, Achmad Haryadi, merangkap sebagai salah satu anggota dewan pengawas tujuh rumah sakit daerah. Temuan ini berawal dari rapat di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya.

Haryadi, pensiunan pegawai negeri sipil DKI, ditunjuk sebagai salah satu anggota dewan pengawas rumah sakit berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2247 Tahun 2016 dan menjadi anggota TGUPP pada 2018. Dalam usulan anggaran, Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada dana Rp 211 juta untuk dewan pengawas yang di antaranya untuk operasional dan gaji.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dua penggajian yang bersumber dari satu APBD bisa menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. "Tolong anggota TGUPP di dewan pengawas rumah sakit ini dievaluasi," katanya.

Di sisi lain, Partai Gerindra mendukung penganggaran TGUPP karena dinilai memberikan hasil yang baik. "Polemik TGUPP sudah berjalan dua tahun. Intinya adalah melakukan evaluasi pada mereka, tetapi tidak lalu meniadakan," kata Syarif dari Partai Gerindra.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda DKI Jakarta Suharti menjelaskan, tim tersebut mempunyai sembilan tugas, seperti disebutkan dalam Peraturan Gubernur DKI No 16/2019, di antaranya memberikan masukan kepada Gubernur DKI, menerima masukan dari masyarakat, dan memastikan program berjalan di lapangan.

Dalam paparannya disebutkan, saat ini ada 67 anggota TGUPP dengan gaji Rp 8 juta-Rp 51,5 juta sebulan. Terdapat empat bidang TGUPP, yaitu bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, respons strategis, hukum dan pencegahan korupsi, serta pengelolaan pesisir. (IRE)